

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.kumparan.com
Media Cetak	

PDIP: New Normal Jangan Diartikan Bebas, Beban Anggaran DKI Akan Lebih Mahal

Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan untuk melanjutkan PSBB atau mulai menerapkan new normal. Padahal, PSBB di Jakarta akan berakhir pada 4 Juni 2020. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, new normal bisa saja dilakukan di Jakarta. Namun harus ada pengetatan protokol kesehatan yang menjadi panduan utama pelaksanaan new normal. "Bisa dilakukan new normal, dengan melakukan pengklasteran. Namun dengan penerapan new normal harus ada pengetatan protokol kesehatan," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa. Menurutnya jika new normal dilakukan tanpa ada pengetatan protokol kesehatan yang serius, maka penyebaran virus corona kembali menyebar luas. Yang akhirnya akan membuat beban anggaran DKI jauh lebih besar. "Dan dilakukan pengawasan yang sangat ketat. Sebab kalau new normal dipahami bebas, akan jauh lebih mahal ongkos yang akan ditanggung oleh Pemprov DKI," tuturnya. Saat ini saja, anggaran Pemprov DKI Jakarta sudah tersisa Rp 44,66 triliun. Sebab, ekonomi tidak bergerak sehingga pendapatan pajak nyaris tidak ada. Belum lagi, Pemprov DKI harus menyiapkan anggaran darurat penanganan virus corona. Anggota Komisi A DPRD DKI itu pun mengusulkan adanya pengklasteran di wilayah Jakarta. Misalnya, daerah di zona hijau bisa melakukan new normal. Sementara daerah di zona merah tetap harus dalam pengetatan. Namun, hal ini juga sulit diterapkan karena sampai saat ini tidak ada kriteria yang jelas tentang suatu daerah dapat dikatakan zona hijau atau merah. Terlebih, sejak awal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menegaskan seluruh wilayah DKI merupakan zona merah karena menjadi epicentrum, meski ada kelurahan yang bebas corona. "Pemilahan wilayah pandemi. Kalau daerah hijau maka boleh itu dilakukan. Daerah merah tahan dulu," katanya.